



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 23 September 2008

Halaman: 4

## MoU Tower Bersama Perlu Dikaji Ulang

**YOGYA (MERAPI)** - Tiga fraksi di DPRD Kota Yogyakarta, yakni PDIP, Demokrat dan Golkar menyesalkan sikap Pemkot yang dianggap gampang memuluskan PT Indonesia Tower (PT IT) sebagai satu-satunya perusahaan yang akan mengurus tower bersama di Yogyakarta.

Langkah ini dinilai melanggar Keputusan Menteri Informasi dan Komunikasi No 2 tahun 2008 tentang penyelenggaraan tower bersama. "Meski baru sebatas MoU sekitar sebulan lalu, namun Pemkot telah memberikan peluang monopoli kepada PT Indonesia Tower sebagai satu-satunya perusahaan yang mengelola tower bersama," ucap Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta Y Eko Rintarjo kepada wartawan di Gedung Dewan, Senin (22/9).

Dari data Dinas Perizinan, tower yang telah berdiri di Kota Yogyakarta berjumlah 109. Dengan aturan tower bersama tersebut, akan dibangun 55 titik yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Yogyakarta. Satu tower mampu menampung delapan provider perusahaan telekomunikasi.

Dikatakan, sesuai Pasal 13, larangan monopoli tower bersama dengan gamblang dijelaskan. Selain itu, dalam Pasal 4, masyarakat harus dilibatkan untuk mengetahui penataan tower. "Janganlah masyarakat dewan saja tidak pernah diajak bicara," sealfnya.

Lagi pula, lanjut Eko,

penyelenggaraan tower bersama tersebut belum bisa dijalankan. Mengingat Perda Tata Ruang dan Perda IMB saat ini masih dibahas di tingkat dewan. Untuk itu, penandatanganan kesepahaman (MoU) antara Pemkot dengan PT IT perlu dikaji ulang.

Anggota Fraksi Demokrat Supriyanto Untung mengungkapkan, lambatnya pembahasan Perda Tata Ruang ini bukan ada di dewan. Akan tetapi, lanjut dia, bola pembahasan tersebut mandeg di jajaran eksekutif. "Sebenarnya Perda ini akan selesai namun Pusat ternyata men-

girimkan tenaga bantuan teknis (Bantek) untuk merumuskan draf sehingga harus disusun kembali oleh eksekutif sebelum diserahkan kepada kami," ucapnya.

Anggota Fraksi PDIP lainnya, Henry Kuncoroyekti mengutarakannya, sedikitnya ada lima perusahaan yang mendaftarkan lelang terbuka tower bersama tersebut. Namun dalam perjalannya, Pemkot memilih PT IT sebagai pemenang lelang dan akan menyusulkan satu lagi perusahaan untuk menjadi partner PT IT, untuk menghindari monopoli.

(W-8)-n

spada Yth. :

spada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Umum	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005